

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2009, untuk yang ke-9 kalinya bangsa Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu). Seperti halnya pemilu 2004 yang lalu, pemilu 2009 juga akan dilaksanakan 2 kali yaitu pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pelaksanaan pemilu identik dengan partai politik (parpol). Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.¹

Para ilmuwan politik dan sosiolog memberikan kita daftar fungsi-fungsi partai politik secara mengesankan, tanpa memberikan manfaat dalam membedakan faktor-faktor, yang menyebabkan fungsi-fungsi tertentu dapat dilaksanakan secara efisien, atau yang membuat konseptualisasi yang menghubungkan fungsi dan struktur secara memuaskan. Di antara fungsi-fungsi tersebut yang biasanya paling umum dikemukakan adalah representasi (perwakilan), konversi dan agregasi; integrasi (partisipasi, sosialisasi, mobilisasi); persuasi, represi, rekrutmen (pengangkatan tenaga-tenaga baru), dan pemilihan

¹ Miriam Budiardjo, 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, h. 160

pemimpin, pertimbangan-pertimbangan dan perumusan kebijakan, serta kontrol terhadap pemerintah.²

Partai politik dalam pemilu mempunyai peran yang sangat kuat untuk dapat terlaksananya pemilu. Dalam menjalankan perannya partai politik tidak bisa lepas dari fungsi-fungsinya. Dalam Negara demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:³

1. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik,
2. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik,
3. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik,
4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik.

Hubungan antara pemilu dan partai politik yaitu melalui partai kita dapat memilih pemimpin bangsa, menjalankan mesin pemilu, sebagai sarana kampanye politik, mengawasi kaum-kaum eksternis dari kedua spektrum politik. Mendorong diskusi umum tentang isu-isu penting dan yang terpenting berfungsi sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah.

Jika pemilihan umum dianggap sebagai salah satu wujud partisipasi politik, maka pemilihan umum identik dengan besarnya partisipasi kaum muda di dalamnya, khususnya bagi siswa Sekolah Menengah Atas yang baru pertama kalinya akan memberikan suaranya. Dipandang dari sudut usia yang berkisar antar 17-19 tahun, berarti mereka adalah generasi baru yang dipandang dapat memberikan kemajuan dan perbaikan bagi bangsa dan negara ini.

² Ichlasul Amal, 1988. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: PT. Tiara wacana Yogya, h. 27

³ Miriam Budiharjo, *Op.Cit.* h. 163

Dalam penelitian di Amerika ada empat faktor yang mempengaruhi partisipasi politik anak muda, yaitu status sosial ekonomi orang tua, partisipasi orang tua, kegiatan sekolah menengah atas remaja, dan orientasi kemasyarakatan orang tua.⁴

Siswa SMA sebagai anak muda pemilih pemula yang terpelajar merupakan bagian vital dalam pemilu, yang mempunyai peranan penting dalam upaya menjalankan pembangunan politik di masa depan. Ada empat kemungkinan peranan yang dapat dimainkan generasi muda dalam pemilihan umum:⁵

1. Menjadikan pemilu sebagai sarana pendidikan politik nonformal/informal
2. Sebagai partisipan netral yang mendambakan tegaknya tatanan demokrasi dalam segala aspek kehidupan.
3. Menjadi wasit baik formal maupun nonformal.
4. Menjatuhkan pilihan, dalam arti mencoblos tanda gambar.

Sebagai generasi penerus bangsa, siswa pemilih pemula seharusnya diberikan pendidikan politik yang cukup. Siswa Pemilih Pemula pada umumnya kurang mendapatkan informasi tentang pemilu. Apalagi bagi mereka yang memilih jurusan Ilmu Pengetahuan Alam sebagai konsentrasi pendidikannya.

Siswa pemilih pemula sangat menarik untuk dikaji sebab mereka merupakan salah satu basis massa yang menjadi sasaran bagi partai politik untuk mengumpulkan suara. Disamping itu pemilih pemula dianggap belum tahu mengenai persepsi tentang partai politik, maka untuk mengetahui persepsi dari

⁴ M. Rusli Karim, 1991. *Pemilu Demokrasi Kompetitif*. Yogyakarta:PT. Tiara Wacana Yogya, h.68-69

⁵ *Ibid.* h.71-72

siswa pemilih pemula terhadap partai politik menjelang pemilu legislatif 2009 diambil siswa SMA N 1 Bantul sebagai objek yang diteliti oleh penulis.

SMA N 1 Bantul merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas favorit di Kabupaten Bantul yang terletak di jalan Wachid Hasim Bantul. Dimana siswa-siswanya sebagian besar merupakan calon pemilih pemula dalam pemilu 2009.

Didalam penelitian ini penulis mengambil penelitian skripsi dengan judul Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Partai Politik Menjelang Pemilu Legislatif 2009 dengan studi kasus di SMA N 1 Bantul. Didalam penelitian diambil siswa kelas XII sebagai fokus penelitian, sebab siswa kelas tiga merupakan siswa yang mayoritas merupakan calon pemilih pemula pada pemilu 2009.

Ada beberapa alasan penulis memilih SMA N 1 Bantul sebagai tempat penelitian, yaitu:

1. SMA N 1 Bantul merupakan Sekolah Menengah Atas di Bantul yang siswanya berasal dari berbagai kecamatan di kabupaten Bantul, dan ada sebagian siswanya juga berasal dari luar kabupaten, seperti Kulon Progo. Jadi dari segi domisili siswa SMA N 1 Bantul dianggap sudah dapat mewakili siswa-siswa dari sekolah lain yang ada di Kabupaten Bantul.
2. Jika dilihat dari segi kualitas intelektual siswa SMA N 1 Bantul merupakan sekolah unggulan yang dihuni oleh siswa-siswa pilihan dari berbagai kecamatan di kabupaten bantul dan kabupaten lain di DIY. Terbukti pada bulan Agustus 2008 SMA N 1 Bantul mewakilkan 6 siswanya untuk mengikuti Olimpiade Science Nasional yang berlangsung di kota Makassar.

3. Dari segi sejarah SMA N 1 Bantul merupakan Sekolah Menengah Atas Negeri tertua yang ada di Kabupaten Bantul. SMA tersebut sudah berdiri sejak tahun 1963 dengan nama SMA Persiapan bertempat di Jl. RA. Kartini Tlirenggo Bantul. Sekolah ini didirikan oleh Bapak Bupati Bantul KRT. Sosrodiningrat, Kartono dan KRT. Pringgadiningrat pada tanggal 17 September 1963. Kemudian, mulai tanggal 1 November 1963 SMA Persiapan ini berubah nama menjadi SMA Filial. Pada tahun 1964 SMA Filial pindah di Jl. KHA Wakhid Hasyim, Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan menetap hingga sekarang. Tepat pada tanggal 1 Agustus 1964 SMA Filial resmi menjadi SMA Negeri 1 Bantul.⁶

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka diambil rumusan masalah penelitian yaitu: *Bagaimana persepsi pemilih pemula yang ada di SMA N 1 Bantul terhadap partai politik menjelang pemilu legislatif 2009?*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Persepsi pemilih pemula terhadap partai politik menjelang pemilu legislatif 2009.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi:

a. Secara Teoritis

⁶ <http://www.sman1bantul.sch.id/index.php>. akses 9 September 2008

Dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang bagaimana teori yang selama ini didapat dari bangku kuliah dapat di terapkan dalam kehidupan masyarakat.

b. Secara Praktis

Dapat memberikan masukan kepada siswa sebagai pemilih pemula dalam memahami partai politik peserta pemilu. Serta dapat mengetahui fungsi-fungsi dari partai politik didalam pemilihan umum sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah didalam menyelenggarakan pemilu di Indonesia.

D. Kerangka Dasar Teori

Untuk memahami masalah yang akan diteliti, maka perlu mempunyai pedoman atau landasan dasar pada suatu teori. Sebelum penulis lebih jauh melangkah, maka harus diketahui lebih dahulu apa yang disebut dengan teori.

Teori menurut Sarlito Wirawan Sarwono “Teori adalah serangkaian hipotesa atau proposisi yang saling berhubungan tentang suatu gejala (fenomena) atau sejumlah gejala”.⁷ Sedangkan menurut Mandler dan Kessen “*Theories are sets of statements, understandable to other, which make predictions about empirical events*”⁸

1. Persepsi

Menurut Bimo Walgito Persepsi adalah proses pengorganisasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga

⁷ Sarlito Wirawan Sarwono,1983. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 4

⁸ *Ibid*, h. 5

merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktifitas yang integral dalam diri individu.⁹

Menurut Saparinah Sadli batasan persepsi adalah sebagai persepsi seseorang merupakan suatu proses yang aktif dimana memegang peranan bukan hanya setimulasi yang mengenalnya, tetapi juga ia sebagai keseluruhan dengan pengalaman-pengalamannya, motivasi sikap yang relevan terhadap setimulus tersebut.¹⁰

Menurut Irwanto persepsi adalah proses diterimanya rangsangan (objek, kualitas, hubungan antar gejala, maupun peristiwa) sampai rangsangan itu disadari dan dimengerti.¹¹

Sedangkan menurut Jalaludin Rachmad persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dengan menafsirkan peta.¹²

Menurut Adam Ibrahim persepsi adalah suatu proses dengan mana seseorang mengorganisasikan dalam pikirannya, menafsirkan, menjalankan dan mengolah pertanda atau segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya.

Menurut Miftah Toha persepsi adalah bentuk dalam proses kognitif yang dialami setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan peciuman.

⁹ Bimo Walgito, 1991. *Psikologi Sosial sebagai Pengetahuan*. Yogyakarta: Andi Offset, h. 94

¹⁰ Saparinah Sadli. 1989. *Persepsi sosial mengenai perilaku penyimpangan*. LP3ES.

¹¹ Irwanto, 1991. *Psikologi Umum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, h. 71

¹² Jalaludin Rachmad. 2000. *Persepsi Mahasiswa Terhadap Partai Politik*. Skripsi UMY. h 50.

Kunci untuk memahami penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.¹³

Menurut Ahmad Fauzi Persepsi adalah sebagai berikut: Persepsi adalah menafsirkan stimulus yang ada di dalam otak. Ditempat yang lain Ahmad Fauzi mendefinisikan persepsi sebagai kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan, dan sebagainya.¹⁴

Sedangkan menurut Adam Ibrahim Indra Wijaya persepsi adalah siapapun yang mengambil inisiatif selalu berharap tujuannya berkomunikasi dapat diterima dan dimengerti oleh yang menerima. Penerimaan inilah yang disebut sebagai persepsi. Persepsi adalah dasar proses kognitif atau proses psikologis.¹⁵

Karena persepsi bukan merupakan suatu penginderaan, maka ada penulis yang menyatakan persepsi sebagai *the interpretation of experience* (penafsiran pengalaman).¹⁶ Suatu persepsi tidak bisa terlepas dari suatu penginderaan, karena persepsi terjadi setelah adanya suatu penginderaan.

Menurut Indra Wijaya Persepsi merupakan cara seseorang menyerap dan mengorganisasikan informasi dalam lingkungan sekeliling. Persepsi merupakan proses pribadi, dimana pandangan seseorang terhadap objek mungkin saja berbeda antara satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan

¹³ Miftah Toha. 1990. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta:CV. Rajawali, h:138

¹⁴ Ahmad Fauzi. 1997. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia, h.37-38

¹⁵ Adam Ibrahim Indrawijaya. 1986. *Perilaku organisasi*. Jakarta:Sinar Baru, h.24

¹⁶ *Ibid.* h. 71-72

persepsi seseorang dipengaruhi atau ditentukan oleh berbagai faktor, yang oleh Indra Wijaya disebutkan antara lain:¹⁷

- a. Faktor lingkungan.
- b. Faktor konsepsi
- c. Faktor yang berhubungan dengan konsep seseorang tentang dirinya sendiri.
- d. factor yang berhubungan dengan motif dan tujuan.
- e. Faktor pengalaman masa lampau.
- f. Faktor pengetahuan.

Apa yang ada dalam diri individu mengadakan persepsi, ini merupakan faktor internal. Disamping itu masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi dalam proses persepsi, yaitu faktor stimulus itu sendiri dan faktor lingkungan dimana persepsi itu berlangsung, dan ini merupakan faktor eksternal

Agar setimulus dapat dipersepsi, maka setimulus harus cukup kuat. Setimulus harus melampaui ambang setimulus, yaitu kekuatan setimulus yang minimal tetapi sudah dapat menimbulkan kesadaran, sudah dapat dipersepsi oleh individu. Setimulus yang kurang jelas akan berpengaruh dalam ketetapan persepsi. Bila setimulus tersebut berwujud benda maka ketetapan persepsi lebih terletak pada individu yang mengadakan persepsi, karena benda-benda yang dipersepsi tersebut tidak ada usaha untuk mempengaruhi yang mempersepsi.

¹⁷ Indra Wijaya. 2008. *Persepsi Mahasiswa Terhadap Partai Politik*. Skripsi UMY.h.17

Mengenai keadaan individu yang dapat mempengaruhi hasil persepsi datang dari dua sumber, yaitu yang berhubungan dengan segi kejasmanian, dan yang berhubungan dengan segi psikologis. Sedangkan lingkungan atau situasi khususnya yang melatar belakangi stimulus juga akan berpengaruh dalam persepsi, lebih-lebih bila objek persepsi adalah manusia. Objek dan lingkungan yang melatar belakangi objek merupakan kebulatan dan kesatuan yang sulit dipisahkan. Objek yang sama dengan situasi sosial yang berbeda, dapat menghasilkan persepsi yang berbeda.

Persepsi merupakan salah satu faktor dalam diri seseorang yang mempengaruhinya dalam pengambilan keputusan untuk berperilaku tertentu. Oleh karena itu persepsi sangat mempunyai sifat yang subyektif dan merupakan hasil penilaian terhadap suatu objek.

Dalam hal ini manusia menjadi perseptor dalam proses persepsi secara runtut melihat objek sasaran barang, kejadian dan atau hubungan antara keduanya, mendengar, menyentuh (jika objeknya fisik/benda), merasakan, atau memahami secara mendalam. Setelah itu perseptor (orang yang melakukan persepsi) mengorganisasikan penafsiran dan akhirnya menilai berdasarkan pengalaman yang dialaminya.

Dengan demikian manusia menafsirkan atau menilai kepada suatu rangsangan selalu menggunakan indranya yaitu melalui proses mendengar, melihat, merasa, meraba, dan mencium yang dapat terjadi terpisah-pisah atau serentak.

Hal-hal atau syarat-syarat yang harus ada dalam proses persepsi adalah:

1. Objek atau sasaran yang diamati.
2. Alat atau indra yang cukup baik untuk menangkap objek.
3. Perhatian, yang dalam hal ini merupakan persiapan dalam mengadakan pengamatan.

Berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut, maka yang dimaksud dengan persepsi adalah suatu proses pemahaman mengenai hubungan peristiwa-peristiwa dan objek-objek sosial. Oleh karena itu maka persepsi berada pada pikiran dan perasaan manusia secara pribadi, sehingga dimungkinkan antara orang-orang yang satu dengan yang lain memiliki persepsi yang berbeda walaupun objek yang dikaji sama.

Dengan kata lain persepsi itu berada pada alam subjektif dan bukan pada alam objektif. Akan tetapi walaupun persepsi berada pada alam subjektif, suatu persepsi tidak akan terbentuk tanpa berdasarkan pada kepentingan, pengalaman, pengaruh-pengaruh sosial yang kesemuanya terjadi di dalam masyarakat.

Ada hal-hal yang menyebabkan satu objek sama dipersepsi berbeda oleh orang yang satu dengan yang lain. Perbedaan persepsi dapat disebabkan oleh hal-hal di bawah ini:¹⁸

1. Perhatian

¹⁸ Sarlito Wirawan Sarwono.1983. *Pengantar Umum Psikologi*. Jakarta: Bulan Bintang,43 h.

Biasanya kita tidak menangkap seluruh rangsang yang ada di sekitar kita sekaligus, tetapi kita memfokuskan perhatian kita pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus antar satu orang dengan orang lainnya menyebabkan perbedaan persepsi antara mereka.

2. Set

Set adalah harapan seseorang akan rangsangan yang akan timbul. Misalnya, pada seseorang pelari yang setiap di garis “start” terdapat set bahwa akan terdengar bunyi pistol di saat mana ia harus mulai berlari. Perbedaan set dapat menyebabkan perbedaan persepsi.

3. Kebutuhan.

Kebutuhan-kebutuhan sesaat maupun yang menetap pada diri seseorang, akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Dengan demikian, kebutuhan-kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan perbedaan persepsi.

4. Sistem Nilai

Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat mempengaruhi pula terhadap persepsi.

5. Ciri kepribadian

Ciri kepribadian akan mempengaruhi persepsi. Misalnya A dan B bekerja di satu kantor yang sama di bawah pengawasan satu atasan. A yang pemalu dan penakut, akan mempersepsi atasannya sebagai tokoh yang menakutkan dan perlu di jauhi. Sedangkan B yang punya lebih banyak

kepercayaan diri, menganggap atasannya sebagai tokoh yang dapat diajak bergaul seperti orang biasa yang lainnya.

6. Gangguan Kejiwaan.

Gangguan kejiwaan dapat menimbulkan kesalahan persepsi yang disebut *halusinasi*. Berbeda dari ilusi, halusinasi bersifat individual, jadi hanya dialami oleh penderita yang bersangkutan saja.

Menurut Jack C. Plano perilaku politik adalah pikiran atau tindakan yang berkaitan dengan pemerintah. Perilaku politik ini meliputi tanggapan-tanggapan internal seperti persepsi-persepsi, sikap-sikap, dan keyakinan-keyakinan juga meliputi tindakan-tindakan yang nyata seperti pemberian suara, protes, lobbying.¹⁹

Jadi menurut Jack C Plano persepsi merupakan salah satu dari tanggapan yang dilakukan oleh seseorang untuk menentukan pikirannya tentang suatu objek, dalam hal ini tentang perilaku politik.

Persepsi merupakan suatu faktor penentu yang terdapat dalam diri seseorang yang akan mempengaruhi dirinya dalam mengambil suatu keputusan atau melakukan suatu tindakan atau perilaku tertentu, oleh karena itu persepsi merupakan suatu bentuk penilaian terhadap objek tertentu

Sebelum adanya persepsi, individu menerima objek melalui proses-proses tertentu sehingga terbentuk sebuah kesimpulan yang kemudian menjadi sebuah persepsi. Sub proses dalam persepsi ada tiga macam, yaitu :

1. Stimulus atau objek yang hadir.

¹⁹ Jack J Plano, Robert E. Riggs dan Herlenen S. Robin.1982. *Kamus Analisis Politik*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. h.161

2. Registrasi, interpretasi dalam mas registrasi, seseorang menerima informasi melalui pengindraan. orang tersebut akan menerima informasi yang terdengar atau terlihat, lalu timbul interpretasi tergantung bagaimana seseorang melalui pendalaman motivasi dan kepribadian orang yang mempunyai persepsi.
3. Umpan balik yang merupakan reaksidari obyek persepsi.²⁰

Dari beberapa uraian-uraian diatas penulis dapat memberikan disimpulkan bahwa:

1. Persepsi dari satu orang dengan orang yang lain dapat berbeda-beda.
2. Persepsi sangat dipengaruhi oleh faktor latar belakang dari masing-masing individu, dimana latar belakang disini mencakup latar belakang ilmu pengetahuan dan lingkungan.
3. Persepsi juga dipengaruhi oleh cara atau bentuk masuknya informasi yang diterima masing-masing individu, hal ini dikarenakan penerima rangsang dan kepekaan manusia berbeda-beda.
4. Persepsi dapat berkembang melalui pengaruh informasi-informasi baru yang diterima oleh setiap individu.

Dengan demikian sangat wajar apabila persepsi orang yang satu dengan orang yang lain berbeda, walaupun obyek yang diamati sama dan pada waktu yang bersamaan. Organisasi dalam persepsi, mengikuti beberapa prinsip, yaitu:²¹

1. Wujud dan Latar.

²⁰ Meriam Budihardjo, *Op Cit.* hal.161

²¹ Sarlito Wirawan Sarwono. *Op Cit.* hal. 39

Objek-objek yang kita amati disekitar kita selalu muncul sebagai wujud (figure) dengan hal-hal lainnya sebagai latar (ground). Misalnya: kalau kita melihat meja di dalam kamar, maka meja tersebut menjadi wujud sedangkan barang-barang yang lain menjadi latar.

2. Pola Pengelompokan

Hal-hal tertentu cenderung kita kelompokkan dalam persepsi kita, dan bagaimana cara kita mengelompokkan itu akan menentukan bagaimana kita mengamati hal-hal tersebut.

3. Ketetapan Ukuran

Pohon setinggi dua meter, kalau dilihat dari jauh mungkin akan nampak sangat kecil, tetapi kita tetap mempersepsikannya sebagai benda yang tinggi dan besar.

4. Ketetapan Letak

Dalam kendaraan yang berjalan, kita akan melihat pohon-pohon dan tiang-tiang listrik bergerak, tetapi itu hanya dalam persepsi kita. sebenarnya pohon dan tiang listrik itu tidak bergerak.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi dari persepsi adalah proses yang terjadi dalam pribadi seseorang dalam memahami informasi, atau memberikan penilaian terhadap suatu objek berdasarkan faktor pengalaman, pengetahuan, dan faktor lingkungan.

2. Partai Politik

a. Pengertian Partai Politik

Menurut Meriam Budiharjo Partai Politik adalah:

Suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.²²

Menurut Carl J. Frieddrich Partai Politik adalah:

Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan parainya dan, berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatannya yang bersifat adil maupun materiil.²³

Sedangkan menurut R.H Soltau Partai politik adalah:

Sekelompok warga Negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka.²⁴

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1

Ayat 1 pengertian partai politik adalah sebagai berikut:

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Jadi dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, tujuan, nilai, dan cita-cita yang sama. Dan bertujuan untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan

b. Fungsi Partai Politik

²² Meriam Budiharjo, *op.cit.* h 159

²³ *Ibid*, h. 161

²⁴ *Ibid*, h. 161

Adapun fungsi atau peran dari partai politik adalah sebagai berikut.²⁵

(i). Partai politik sebagai sarana komunikasi politik

Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.

Masyarakat yang heterogen akan menyulitkan penyampaian pendapat atau aspirasi masing-masing individu. Cara paling tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan cara menampung dan menggabungkan pendapat dan aspirasi masyarakat yang senada, proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*).

Setelah proses penggabungan kepentingan proses selanjutnya adalah proses perumusan kepentingan (*interest articulation*). Proses ini merupakan proses dimana pendapat dan aspirasi dari masyarakat diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Semua proses tersebut harus dapat dilakukan oleh partai politik untuk dijadikan sebuah usulan kebijakan.

Intinya, dalam proses penyaluran aspirasinya partai politik harus merumuskan aspirasi masyarakat menjadi suatu kepentingan. Kepentingan tersebut kemudian diusulkan kepada pemerintah untuk kemudian dijadikan kebijakan umum.

Disamping menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, Partai politik juga harus menyebarluaskan

²⁵ *Ibid*, h. 163

rencana-rencana dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Dengan begitu terjadi arus komunikasi informasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, dimana peran partai politik merupakan penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

Ilmuan politik Mark Roelofs mengatakan Politik adalah pembicaraan, atau lebih tepatnya kegiatan politik adalah berbicara. Roelof menekankan bahwa politik tidak hanya pembicaraan, juga tidak semua pembicaraan adalah politik. Akan tetapi, hakikat pengalaman politik, dan bukan hanya kondisi dasarnya, ialah bahwa ia adalah kegiatan berkomunikasi antara orang-orang.²⁶

Jadi partai politik sebagai sarana komunikasi politik tidak boleh hanya sekedar pembicaraan. Partai politik harus melakukan tindakan-tindakan yang nyata sebagai fasilitator penyampaian pesan dari rakyat kepada pemerintah, atau sebaliknya dari pemerintah kepada rakyat.

(ii). Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik

Di dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Biasanya proses politik berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa.

²⁶ Dan Nimmo, 1993. *Komunikasi Politik Komunikasi, Pesan, dan Media*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. h.8

Misalnya pada masa kanak-kanak, mereka memperoleh pengetahuan politik hanya melalui orang tuanya. Ketika dewasa maka perolehan informasi seseorang di dapat dari berbagai sumber. Sumber memperoleh informasi ini dapat berasal dari media massa, pendidikan, maupun pengalaman.

Pada fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi politik, partai politik harus berusaha menciptakan citra baik kepada masyarakat, dan menunjukkan bahwa partai politik telah memperjuangkan kepentingan umum. Partai politik juga berperan mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

(iii). Partai politik sebagai recruitment politik

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitment). Dalam hal ini partai politik menggunakan votegetter (penarik massa).

Partai politik dalam merekrut anggotanya menggunakan beberapa cara, diantaranya dengan melalui kontak pribadi, persuasi, dan lain sebagainya. Partai politik juga berusaha menarik golongan-golongan muda untuk dididik menjadi kader partai politik yang kemudian di masa mendatang akan menggantikan pimpinan partai politik yang lama. Dengan kata lain rekrutmen politik ini juga

bertujuan untuk mencari generasi-generasi baru yang akan menjadi andalan partai politik di masa depan.

(iv). Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (conflict management)

Dalam Suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya.

Partai politik dalam fungsinya sebagai sarana pengatur konflik berada di tengah-tengah kelompok yang bertikai. Partai politik menjadi mediasi dalam penyelesaian konflik.

Namun sangat disayangkan, dalam prakteknya fungsi-fungsi partai politik tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik. Informasi yang diberikan seringkali meresahkan masyarakat. Partai politik juga lebih mementingkan kepentingan partai, bukan kepentingan nasional. Bahkan partai politik tidak dapat menyelesaikan konflik, akan tetapi malah memperpanjang konflik yang ada.

3. Pemilih Pemula

Pemilih pemula yang dikonotasikan sebagai pemegang hak pilih pertama kalinya memberikan hak suaranya dalam pemilu. Pemilih Pemula menurut Genewati Wuryandari adalah “seseorang yang baru pertama kali ikut pemilihan umum”.²⁷

Penyusun lebih memilih sebutan pemilih pemula, karena dengan cara membahas definisi tiap kata, jauh diperoleh kebenaran definisi. Pemilih

²⁷ Genewati Wuryandari. *Perilaku Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilu Legislatif 2004*. Skripsi UMY 2009. h.30

pemula terdiri dari dua kata yaitu “pemilih” dan “pemula”. Pemilih menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah “orang yang memilih”, sedangkan kata pemula mempunyai arti “orang yang mulai atau mula-mula melakukan sesuatu”. Jadi pemilih pemula menurut rujukan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah semua orang yang untuk baru pertama kalinya memberi hak pilihnya dalam pemilihan umum.

Posisi pemilih merupakan posisi yang sangat penting dalam menentukan arah demokrasi sebuah negara. Menurut Eep saefullah, untuk menjadikan pemilih betul-betul sebagai penentu, diperlukan setidaknya dua syarat, yaitu:

1. Pemilih memiliki pengetahuan minimal serta menggunakan akal sehat dan nuraninya.
2. Pemilu yang demokratis, sebab semakin pemilu tersebut tidak demokratis maka para pemilihnya semakin tidak menentukan.

Ada dua pilihan bagi seorang pemilih. Pilihan pertama adalah menjadi pemilih yang bertanggungjawab, yaitu memilih menggunakan akal sehat dan hati nurani serta dengan penuh kesadaran membangun hubungan pertanggungjawaban, semacam kontrak dengan orang-orang yang mereka pilih.

Setelah pemilu usai, pemilih menjadi penagih janji yang proaktif yang terus terjaga meminta pertanggungjawaban dari orang-orang yang mereka pilih. Sedangkan yang kedua adalah menjadi pemilih yang tidak bertanggungjawab atau tidak memilih sama sekali.

Di dalam konstitusi demokrasi ditegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dalam hal ini rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis paling tidak dalam dua hal, yaitu yang pertama memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan pemerintahan guna mengurus dan melayani masyarakat. Sedangkan yang kedua untuk memilih wakil rakyat yang akan bertugas mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Cara untuk mewujudkan kedaulatan tersebut adalah melalui pemilihan umum yang diadakan lima tahun sekali. Pemilihan umum harus dilakukan dengan pemilihan umum secara langsung yang nantinya digunakan oleh masyarakat untuk menjalankan roda demokratisasi, yaitu dengan cara memilih pada saat pemilu.

Pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil mempunyai dampak positif bagi perjalanan demokratisasi di tingkat local maupun nasional. Masyarakat diberikan hak suara untuk memilih apa yang mereka nilai mampu memperjuangkan aspirasi dan pendapat masyarakat apabila nantinya terpilih. Artinya adalah bahwa pemilih harus mempunyai pengetahuan yang baik mengenai hak dan kewajiban dalam pemilihan umum sehingga tumbuh suatu kesadaran yang tinggi akan pentingnya keikutsertaan pemilih dalam pemilu.

Meningkatnya kesadaran dan keikutsertaan atau pun partisipasi, serta pengetahuan politik pemilih dalam pemilu akan dapat mewujudkan

suatu pemilihan umum yang berkualitas. Kualitas pemilihan umum yang baik akan menghasilkan pemimpin maupun wakil rakyat yang baik pula.

Kemudian yang disebut sebagai pemilih adalah sebagai berikut. Dalam peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendefinisikan pemilih sebagai berikut. “Pemilih adalah warga negara Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah berusia 17(tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah atau pernah kawin dan atau tidak sedang dicabut hak pilihnya”.

Pemilih ini adalah pemilih yang memiliki hak pilih, yaitu mereka yang telah terdaftar sebagai pemilih dan memenuhi syarat-syarat yaitu : tidak terganggu jiwa atau ingatannya, dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan. Hak untuk memilih harus dilaksanakan dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab.

Jadi menurut penulis, pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah berusia 17(tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah atau pernah kawin dan atau tidak sedang dicabut hak pilihnya dan merupakan kesempatan pertama bagi pemilih tersebut untuk memilih pada pemilihan umum.

Pemilih pemula yang menjadi objek penelitian adalah siswa kelas XII Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bantul. Siswa kelas dua belas di sekolah ini sebagian besar berusia antara 17-19 tahun, sehingga jelas pada

pemilu 2009 yang lalu mereka belum memiliki hak pilih dan belum pernah memilih. Dan pada pemilu 2009 yang akan datang siswa-siswa ini akan memberikan suaranya untuk yang pertama kalinya dalam pemilihan umum dan disebut sebagai pemilih pemula.

4. Pemilihan Umum

a. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan sarana legitimasi bagi penguasa untuk dapat menjalankan pemerintahannya. Hal ini dikarenakan pemilihan umum melibatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan dan segala lapisan masyarakat ikut memberikan hak pilihnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIIB Pasal 22E, pada Ayat 1 disebutkan bahwa:

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Sedangkan di ayat tiga disebutkan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai politik.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal I disebutkan pengertian Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945.

b. Asas Pemilihan Umum.

Berdasarkan Undang –Undang Nomor 22 tahun 2007, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

i. Langsung.

Dalam penyelenggaraan pemilu dilakukan secara langsung oleh pemilih untuk memilih partai, presiden dan wakil presiden, maupun anggota legislative. Pemilihan secara langsung ini merupakan penggambaran dari adanya demokratisasi.

ii. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan pemilu berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu. Jadi pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan.

iii. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dari siapapun. Dalam melksanakannya masyarakat dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendaknya.

iv. Rahasia

Setiap warga negara yang memilih dalam pemilu dijamin kerahasiaannya. Sehingga setiap-setiap individu tidak tau akan pilihan orang lain.

v. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pemerintah, partai politik, KPU, Bawaslu dan pihak-pihak terkait haru bersifat dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

vi. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun.

c. Sistem Pemilihan Umum.

Di dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam system pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:²⁸

i. *Singgel-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil. biasanya disebut Sistem Distrik)

Ada dua karakteristik yang membedakan system distrik dengan system-sistem pemilu yang lain, yaitu:²⁹

- Di dalam system distrik, pemilihan dikaitkan secara langsung dengan adanya satu daerah pemilihan yang disebut distrik. Biasanya distrik ini tidak identik dengan suatu pembagian wilayah administrative, melainkan sebuah garis-garis perbatasan yang sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan syarat-syarat pemilihan umum. Artinya jika suatu daerah administrative yang satu dengan yang lain menjadi satu distrik pemilihan, hal ini tidak menjadi masalah.
- Yang menjadi fokus pemilihan di dalam system distrik bukanlah suatu organisasi politik, melainkan seseorang individu yang

²⁸ Miriam Budiharjo, *Op.Cit.* h.177

²⁹ Nazarudin Syamsudin.1993.*Dinamika Sistem Politik Indonesia.* Jakarta:Pt.Gramedia. h143

mewakili atau dicalonkan oleh partai politik di dalam suatu distrik.

Politisi yang berada di suatu distrik tidak boleh mewakili distrik lain.

Segi positif dari system distrik adalah sebagai berikut:

- Sistem ini masyarakatnya saling kenal antara rakyat yang memilih dengan yang dipilih. Hal ini akan memudahkan rakyat untuk menyampaikan aspirasinya.
- Dalam memilih calon yang akan dipilihnya masyarakat terhindar dari praktek membeli kucing dalam karung.

Adapun kelemahan dari system distri ini adalah sebagai berikut:³⁰

- Sistem ini kurang memperhitungkan adanya partai-partai kecil dan golongan mayoritas. Apalagi jika diperkuat dengan golongan-golongan tersebut terpecah di dalam beberapa distrik.
- Sistem ini kurang representatif dalam arti calon yang kalah dalam suatu distrik kehilangan suara-suara yang mendukungnya. Hal ini berarti ada suara yang sama sekali tidak diperhitungkan.

ii. *Multi-member countituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan Proporsional Representation atau Sistem Perwakilan Berimbang)

Sistem pemilihan proporsional adalah system pemilihan umum dimana kursi yang tersedia diparlemen pusat diperebutkan dalam suatu pemilihan umum. Kursi-kursi tersebut dibagikan kepada

³⁰ Meriam Budiharjo. *Op.Cit.* h. 177-178

partai-partai politik yang turut dalam pemilihan umum sesuai dengan perolehan suara partai politik yang bersangkutan.

Terdapat keuntungan yang sangat mendasar dari system proporsional ini, yaitu bersifat representative. Artinya, setiap suara turut diperhitungkan dan praktis tidak ada suara yang hilang. Partai-partai kecil pun dapat menempatkan wakilnya dalam parlemen. Masyarakat yang heterogen seperti Indonesia biasanya memilih istem ini sebagai system pemilihan umumnya.³¹

Adapun kelemahan dari system proporsional ini adalah sebagai berikut:

- Sistem mempermudah timbulnya partai-partai baru. Sistem ini juga cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan yang ada. Umumnya system ini mempunyai akibat memperbanyak jumlah partai.
- Banyaknya partai politik mempersulit terbentuknya pemerintah yang stabil.
- Wakil yang dipilih merasa dirinya lebih terikat pada partai dan kurang merasakan loyalitas kepada daerah yang telah memilihnya.

d. Sistem Pemilu 2009

Pemilu 2009 adalah pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, serta pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Untuk pemilu DPR dan DPD surat suara akan memuat nomor dan tanda gambar

³¹ *Ibid.* h. 178

parpol peserta pemilu, dan akan menampilkan daftar caleg untuk setiap daerah pemilihan. Dengan demikian pemilih tidak hanya memilih salah satu partai politik peserta pemilu saja, tetapi sekaligus juga memilih salah satu caleg yang diajukan oleh partai politik.

Yang lain dari pelaksanaan pemilu sebelumnya, pemilu 2009 tidak lagi menggunakan system coblos. Mekanisme yang digunakan oleh pemilih untuk memilih pada pemilu 2009 adalah pencontengan. Setiap pemilih diharuskan menconteng tanda gambar partai politik maupun nama anggota caleg.

Sejarah lain yang hadir dalam pemilu 2009 adalah adanya 6 partai local yang berasal dari Nangroe Aceh Darussalam. Sesuai dengan perjanjian Helsinki, NAD diperbolehkan mendirikan partai local. Partai local tidak berafiliasi dengan partai nasional. Partai tersebut hanya mengikuti pemilu tingkal local.

e. Peserta Pemilu

Di dalam pemilu 2009 anggota pemilu berasal dari 2 golongan, yaitu partai politik dan perorangan. Untuk memilih anggota DPR, Dan DPRD pesertanya adalah partai politik. Sedangkan untuk memilih DPD, Presiden dan Wakil Presiden anggotanya adalah perorangan.

Pemilih tidak hanya memilih partai politik saja, melainkan pemilih juga dapat memilih salah satu nama calon legislative yang diusulkan oleh partai politik tersebut. Sedangkan untuk anggota DPD pemilih hanya memilih salah satu calon anggota DPD.

f. Penentuan Kursi

Untuk menentukan perolehan kursi di legislative masing-masing partai politik terlebih dahulu akan ditentukan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). BPP akan diperoleh dengan cara membagi jumlah suara yang sah yang didapatkan oleh partai politik dengan jumlah kursi yang diperebutkan. Jumlah suara yang sah yang diperoleh partai politik dibagi BPP sama dengan perolehan kursi partai politik.

E. Definisi Konseptual

Yang dimaksud dengan definisi konseptual adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara konsep yang satu dengan konsep yang lain. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pendefinisian. Dibawah ini merupakan definisi konseptual yang digunakan oleh penulis.

1. Persepsi adalah proses yang terjadi pada diri seseorang dalam memahami suatu informasi, atau memberikan penilaian terhadap suatu objek berdasarkan faktor pengalaman, pengetahuan, dan faktor lingkungan.
2. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, tujuan, nilai, dan cita-cita yang sama. Dan bertujuan untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan.
3. Pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah berusia 17(tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah atau pernah kawin dan atau tidak sedang dicabut hak pilihnya dan

merupakan kesempatan pertama bagi pemilih tersebut untuk memilih pada pemilihan umum.

4. Pemilihan umum adalah Suatu sarana yang tersedia bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya termasuk untuk memilih partai politik.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel. atau definisi operasional merupakan suatu petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Melalui definisi operasional akan ditentukan gejala dan indikator variabel dan bagaimana mengukur gejala atau indikator tersebut.

Persepsi yang didasarkan sikap siswa pemilih pemula terhadap partai politik menjelang pemilu legislatif 2009 merupakan wahana pendidikan bagi para pemilih pemula. Persepsi siswa pemilih pemula terhadap partai politik peserta pemilu legislatif 2009 dapat dilihat dari aspek-aspek seperti di bawah ini:

1. Pengetahuan pemilih pemula terhadap partai politik.
2. Pengetahuan pemilih pemula terhadap fungsi partai politik.
3. Pengetahuan pemilih pemula terhadap ideologi partai politik
4. Pengetahuan pemilih pemula terhadap sistem multi partai.
5. Pengetahuan pemilih pemula terhadap pola-pola kampanye yang dilakukan oleh partai politik.
6. Pengetahuan pemilih pemula terhadap tokoh partai politik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif biasanya mempunyai dua tujuan. yang pertama adalah untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu. Yang kedua adalah untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu.³²

Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk menggambarkan keadaan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bantul serta persepsi siswa pemilih pemula terhadap partai politik menjelang pemilu legislatif 2009.

2. Unit Analisis

Yang dimaksud dengan unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai obyek penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan unit analisisnya adalah siswa kelas XII Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bantul.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian. Data ini diperoleh dari responden, dalam hal ini bersal dari kuesioner yang diisi oleh siswa kelas XII Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bantul.

b. Data Sekunder

³² Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 1981. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta:LP3 ES, h. 4

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi yang berupa buku, jurnal, koran, majalah, skripsi, dan dokumentasi-dokumentasi lain yang diperlukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuesioner.

Pada penelitian survai, Penggunaan keusioner merupakan hal yang pokok dalam pengumpulan data. Hasil kuesioner akan terjelma dalam angka, tabel, analisis statistik dan uraian, serta kesimpulan hasil penelitian.³³ Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti menyerahkan daftar pertanyaan untuk dijawab oleh responden.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada responden yang digunakan untuk mengkonfirmasi kebenaran data dari isian kuesioner.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencatat data sekunder yang dibutuhkan dan tersedia di tempat penelitian.³⁴

5 . Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, penulis hanya meneliti sebagian dari keseluruhan jumlah populasi siswa kelas XII Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bantul. Jumlah siswa kelas XII di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bantul adalah sebagai Berikut:

³³ *Ibid.* h. 130

³⁴ Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2006. *Buku Panduan Penulisan Skripsi (S-1)*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, h. 18

Tabel 1.1
Jumlah siswa kelas XII
Sekolah Menengan Atas Negeri I Bantul

Kelas	Jumlah Siswa
XII IPS 1	43 Siswa
XII IPS 2	42 Siswa
XII IPS 3	43 Siswa
XII IPA 1	37 Siswa
XII IPA 2	38 Siswa
XII IPA 3	37 Siswa
Jumlah	240 siswa

Dalam rangka memperkecil unit analisis, maka dilakukan penarikan sampel. Karena apabila semua populasi dalam unit analisis diteliti akan memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang sangat besar. Beberapa peneliti menyatakan bahwa besarnya sampel tidak boleh kurang dari 10%. Ada pula peneliti lain yang menyatakan bahwa besarnya sampel minimum 5% dari jumlah satuan-satuan elementer dari populasi.³⁵

Diketahui jumlah siswa kelas XII Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bantul sebanyak 240 siswa. 240 Siswa tersebut terdiri dari 128 siswa jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, dan 112 siswa jurusan Ilmu Pengetahuan Alam.

Mengenai besarnya sampel yang diambil, penulis mengambil 30% dari jumlah populasi disetiap elementer. Sehingga yang dijadikan sampel

³⁵ Masri Singarimbun. *Op.Cit.* h.106

yaitu sebanyak 39 siswa untuk siswa kelas XII Ilmu Pengetahuan Sosial, dan 34 siswa untuk siswa kelas XII Ilmu Pengetahuan Alam.

Pengambilan sample sebanyak 30% karena obyek penelitian yaitu siswa kelas XII SMA N 1 Bantul merupakan populasi yang cenderung seragam. Keseragaman dapat dilihat dari segi tingkat pendidikan, emosional, usia, dan pengalaman politik.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian mengenai persepsi pemilih pemula terhadap partai politik menjelang pemilu Legislatif 2009 yang mengambil studi kasus di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bantul ini menggunakan teknik analisis data statistik kualitatif. Untuk menyimpulkan data yang diperoleh dari kuesioner penulis menggunakan skala indeks.

Rumus mencari Indeks:³⁶

$$I = \frac{4F1 + 3F2 + 2F3 + 1F4}{N}$$

Keterangan:

I = Indeks

F= Frekuensi

N= Jumlah sampel

Sedangkan Perhitungan interval dari nilai indeks adalah sebagai berikut:

$$\text{Interval} = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Banyaknya Kriteria}}$$

³⁶ Suranto. Bahan Ajar Statistik Sosial

$$\begin{aligned}\text{Interval} &= \frac{4 - 1}{4} \\ &= 0,75\end{aligned}$$

Dengan kategori sebagai berikut :

3,26 – 4,00 termasuk kategori sangat tinggi

2,51 – 3,25 Termasuk kategori tinggi

1,76 – 2,50 Termasuk golongan rendah

1,00 – 1,75 Termasuk Golongan Sangat rendah

